LAMPIRAN XXIX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

RENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan

d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik – Bangkalan - Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo –

Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;

12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 04);
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 adalah:

a. merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
b. menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2026;
c. menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2026; dan
d. sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika

Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan; dan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah;

3.2. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 pada dasarnya pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan juga terhadap kegiatan lainnya dilakukan secara Internal dan Eksternal.

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang menjadi tanggungjawab dan atau oleh Pejabat Atasan Langsung terhadap bawahannya sebagai pelaksana di masing-masing Unit/Satuan Kerja juga disebut Pengawasan Melekat (Waskat). Pengawasan Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat di luar tanggungjawab SKPD.

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Daerah Kabupaten Nganjuk secara Internal oleh Inspektorat Kabupaten Nganjuk, sedangkan Pengawasan secara Eksternal dilaksanakan oleh Pengawasan Fungsional yaitu BPK-RI, BPKP, Inspektorat Jendral Kemendagri dan Inspektorat Propinsi.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk merupakan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi dari Inspektorat yaitu pembinaan atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Desa serta Pelaksanaan Pembangunan yang sifatnya Reguler/Rutin.

- Untuk memperoleh kepastian terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang baik dan akuntabel, pengawasan merupakan tahapan yang harus dilalui. Pengawasan bukan hanya bersifat penindakan (Represif) tetapi juga bersifat pencegahan (Preventif). Hasil pengawasan yang dilakukan akan dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan Pengawasan yang akuntabel, dengan cara:

"Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan".

Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dimaksud untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan diukur dengan indikator :

"Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP sesuai standar"

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026, pelaksanaan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Kabupaten Daerah Nganjuk adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 TW II

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	INSPEKTORAT									
	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan									
	Inspektorat Daerah									
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**83,05**	**-**	**85**	**81,7**	**96,11%**	**85**	**82,95**	**99,34**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	42 dokumen	-	11 dokumen	11 dokumen	100%	11 dokumen	16 dokumen	38,09
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	3 dokumen	50%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	33,33%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD								
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	33,33%
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		perubahan DPA-SKPD								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	21 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	11 laporan	52,38%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	21 dokumen	-	18 dokumen	18 dokumen	100%	18 dokumen	26 dokumen	123,80%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	6 dokumen	-	2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	4 dokumen	66,67%
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 dokumen	-	16 dokumen	16 dokumen	100%	16 laporan	22 laporan	366,67%
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik	3 dokumen	-	-	-	-	-	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Daerah pada SKPD								
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	189 dokumen	-	53 dokumen	64 dokumen	120,75%	98 dokumen	72 dokumen	38,09%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	51 orang/bln	55 orang/bln	49 orang/bln	89,09%	55 orang/bln	51 orang/bln	92,72%
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	156 dokumen	-	52 dokumen	63 dokumen	121,15%	97 dokumen	68 dokumen	43,59%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	12 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil	3 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	2 laporan	66,67%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	18 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	165 dokumen	-	55 dokumen	49 dokumen	89,09%	51 dokumen	54 dokumen	32,73%
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	12 unit	-	-	-	-	-	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	330 paket	118 paket	-	-	-	-	-	-
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	165 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	48 orang	45 orang	42 orang	93,33%	45 orang	46 orang	102,22%
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	-	-	-	-	-	-
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan	55 orang	51 orang	55 orang	49 orang	89,09%	51 orang	49 orang	89,09%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					perundang-undangan								
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah	153 dokumen	-	50 dokumen	81 dokumen	162%	50 dokumen	92 dokumen	60,13%
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	6 paket	50%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	27 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	7 paket	25,92%
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	14 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	7 paket	50%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	17 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	15 paket	88,23%
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	15 paket	4 paket	4 paket	4 paket	100%	4 paket	7 paket	46,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					yang disediakan								
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	3 dokumen	100%
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	13 laporan	36,11%
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	108 laporan	86 laporan	36 laporan	65 laporan	180,56%	36 laporan	68 laporan	62,96%
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	3 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem	3 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	33,33%

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
						pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daaerah pada perangkat daerah yang disediakan	243 unit	248 unit	196 unit	196 unit	100%	241 unit	292 unit	120,16%
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2 unit	-	-	-	-	-	-	-
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	135 unit	55 unit	107 unit	107 unit	100%	148 unit	183 unit	135,55%
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	105 unit	245 unit	89 unit	89 unit	100%	90 unit	109 unit	103,8%
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 unit	-	-	-	-	-	0	0

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	36 laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	18 laporan	50%
				Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	6 laporan	50%
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	6 laporan	50%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	4 laporan	6 laporan	50%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat	308 unit	-	94 unit	138 unit	138%	221 unit	138 unit	44,81%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					daerah yang terpelihara								
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenadaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	46 unit	12 unit	19 unit	158,33%	12 unit	24 unit	47,06%
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	100 unit	25 unit	45 unit	45 unit	100%	45 unit	45 unit	45%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	143 unit	104 unit	161 unit	70 unit	43,48%	161 unit	71 unit	49,65%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	14 unit	4 unit	3 unit	3 unit	100%	3 unit	4 unit	28,57%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase perangkat daerah yang menerapkan unsur SPIP**	**80%**	-	**60%**	**100%**	**166,67%**	**70%**	**100%**	**166,67%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	**95,38%**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasa APIP > 80%	**76%**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko	35 OPD	-	30 OPD	50 OPD	166,67%	35 OPD	50 OPD	142,85%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Prosentase Jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	90%	-	70%	94,87%	135,53%	80%	96%	106,49%
					Prosentase Jumlah temuan hasil pengawasan APIP yang ditindaklanjuti	90%	-	90%	90,41%	100,46%	92%	91%	101,39%
					Cakupan laporan kegiatan pengawasan dan konsultasi	295 laporan	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK	100%	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase perangkat	100%	-	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					daerah yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP								
				Pengawasan Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	24 aporan	3 laporan	4 laporan	2 laporan	50%	4 laporan	4 laporan	16,67%
				Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	6 laporan	1 laporan	2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	4 laporan	66,67%
				Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	357 laporan	124 laporan	119 laporan	162 laporan	136,13%	119 laporan	162 laporan	45,38%
				Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	300 laporan	35 laporan	100 laporan	50 laporan	50%	100 laporan	54 laporan	18%
				Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	3 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	1 kesepakatan	100%	1 kesepakatan	2 kesepakatan	66,67%
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut	18 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	6 dokumen	100%	6 dokumen	7 dokumen	38,89%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Hasil Pemeriksaan APIP	hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP								
				Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu yang dilakukan	24 laporan	-	8 laporan	22 laporan	275%	2 laporan	18 laporan	75%
					Persentase laporan pengaduan yang tertangani	-	-	-	-	-	-	-	-
				Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	12 laporan	5 laporan	4 laporan	4 laporan	100%	1 laporan	4 laporan	33,33%
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	12 laporan	7 laporan	4 laporan	18 laporan	450%	1 laporan	19 laporan	158,33%
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,	**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan**	**20%**	**-**	**10%**	**50%**	**500%**	**15%**	**50%**	**250%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**FCP (*Fraud Control Planning*)**								
					Jumlah dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai standart	**1 dokumen**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang melaksanakan Manajemen Risiko sesuai standart	**62%**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	**8%**	-	-	-	-	-	-	-
					Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK	**95,24**	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standart	**54%**	-	-	-	-	-	-	-

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional	6 kegiatan	-	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	2 kegiatan	33,33%
					Jumlah dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko	1 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	3 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	33,33%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun	3 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	1 rekomendasi	100%	1 rekomendasi	1 rekomendasi	33,33%
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah perangkat daerah yang memiliki akses	52 OPD	-	52 OPD	52 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					mendapatkan layanan pendampingan dan asistensi								
					Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan register risiko sesuai standart	31 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
					Persentase PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas	90%	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah PD patuh melaksanakan Pedoman MCP KPK	14 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
					Jumlah PD yang menyusun Register Risiko Fraud tepat waktu	30 Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
				Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan	52 OPD	50 OPD	52 OPD	52 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2024)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2025 TW II)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
					dan asistensi urusan pemerintahan daerah								
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	21 OPD	52 OPD	52 OPD	100%	52 OPD	22 OPD	42,30%
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan pemberantasan Korupsi	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasa n korupsi	9 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	3 kegiatan	100%	3 kegiatan	17 kegiatan	188,89%
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi Penegakkan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan , asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	50 OPD	52 OPD	52 OPD	100%	52 OPD	52 OPD	100%

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	99,34%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Nilai SAKIP Inspektorat Tahun 2025 82,95 dari 85. Dikarenakan masih perlunya perbaikan-	Dari rekomendasi tahun sebelumnya bisa menjadi acuan untuk

	perbaikan pada komponen mulai dari perencanaan kinerja sampai dengan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	implementasi ditahun mendatang.
Program Penyelenggaran Pengawasan	166,67%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP pada tahun 2024 yaitu seluruh OPD (30 OPD) dari 18 target OPD yang ditetapkan	-
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	250%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Capaian kinerja tersebut berdasarkan penilaian tahun 2024, Fraud Control Planning pada TW I belum dilaksanakan	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai

dengan bisnis utama (core bussiness) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.4

a. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019-2023

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prosentase Rekomendasi LHP BPK-RI yang selesai ditindaklanjuti			√	85,5%	86%	85,5%	-	-	98,23%	97,64%	92,46%	-	-	
2	Prosentase tindak lanjut temuan yang selesai			√	95%	95%	95%	-	-	96,2%	95,98%	94,17%	-	-	
3	Prosentase kategori hasil evaluasi SAKIP OPD dengan nilai A	√			10%	15%	20%	-	-	18%	40%	16%	-	-	
4	Persentase penyelesaian pengaduan publik			√	90%	90%	90%	-	-	94,11%	96,77%	96,66%	-	-	
5	Prosentase temuan kerugian daerah dan kerugian negara yang selesai			√	85%	85%	90%	-	-	88,03%	85,03%	78,52%	-	-	
6	Level Kapabilitas APIP			√	2	2	2	3	3	2	2	2	2	3	
7	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart		√		NA	NA	NA	28%	30%	NA	NA	NA	30%	36%	

b. Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dan 2025 (TW II)

No	Indikator	SPM/ standar nasional	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	
					Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	9	10
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart*		√		30%	32%	36%	32%
2	Level Kapabilitas APIP			√	3 (3,000)	3 (3,100)	3 (3,000)	3 (3,000)
3	Nilai Maturitas SPIP				3,150	3,200	3,190	3,190

* Level Kapabilitas APIP sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur hal Laporan Hasil Evaluasi Jenjang Pertama atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Level 3 pada Inspektorat Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

** Nilai Maturitas SPIP sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur hal Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Inspektorat Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga yang menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan urusan penyelengaraan Pemerintahan Daerah, dituntut untuk mampu berperan sebagai institusi yang mampu meningkatkan kualitas pengawasan pelaksanaan pembangunan Daerah sehingga dapat mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik *(Good Governance)* maupun Pemerintahan yang bersih *(Clean Government)* dengan tujuan dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga Kabupaten Nganjuk. Permasalahan yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

a. Fungsi Inspektorat tidak lagi sebagai *watchdog,* tetapi juga sebagai *quality assurance* (penjamin mutu) dan *consulting* (memberikan konsultasi dan pendampingan) serta berfungsi untuk mencegah korupsi (sesuai dengan PP Nomor 72 Tahun 2019).
b. Adanya tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) guna mewujudkan *Good Governance.*
c. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
d. Masih belum optimalnya kompetensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan taraf pengetahuan yang dimiliki juga berbeda-beda.
e. Kualitas temuan yang kurang memadai serta berulangkali (rutinitas).
f. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
g. Belum optimalnya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
h. Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
i. Optimalisasi kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

j. Audit belum sepenuhnya berbasis risiko.

k. Hasil audit ketaatan belum mampu memberikan keyakinan penuh bahwa proses tata kelola dan kepatuhan pada peraturan telah berjalan dengan baik.

Dari permasalahan diatas Inspektorat Daerah menetapkan isu strategis:

1. Tuntutan penerapan SPIP dan MRI di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih efektif;
2. Tuntutan pelaksanaan Penjaminan kualitas pada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan guna tercapainya efektivitas kinerja serta akuntabilitas instansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang lebih baik;
3. Tuntutan penguatan APIP yang lebih optimal;
4. Tuntutan memberikan pelayanan publik yang prima;
5. Tuntutan optimalisasi pencegahan korupsi melalui *Monitoring, Center for Prevention (MCP)*, dan Survey Penilaian Integritas (SPI)

2.3.1 Tantangan dan Peluang dalam Peningkatan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan dan pengendalian internal terhadap kebijakan Kepala Daerah sebagai berikut:

1) Tantangan
    1. Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi.
    2. Sosialisasi kebijakan publik dan perundang-udangan belum memadai.
    3. Penegakan hukum dan penerapan sanksi masih rendah.

2) Peluang

1. Tuntutan masyarakat untuk memberantas KKN tinggi.
2. Tingginya kontrol masyarakat akan kinerja instansi pemerintah.
3. Komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik.
4. Tingginya moral, etika, nilai-nilai agama dan kepercayaan masyarakat.

2.3.2. Dampak terhadap Pencapaian Program Prioritas Daerah serta Program Nasional/Internasional yang mencakup TBP/SDGs

Inspektorat Daerah memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah yaitu "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik melalui Kualitas Pengawasan"

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Inspektorat mengampu tujuan TBP SDG's poin 16 yaitu Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh dengan indikator dan target sebagai berikut:

No	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2023)	Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
1	Tujuan SDGs 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh									
	Secara substantial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya									
	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi	Nilai	2,790	2,800	2,904	2,900	-	3,000	-	
	Nilai maturitas SPIP	Nilai	3,169	3,159	3,190	3,200	-	3,250	-	
	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	Persentase	36	30	32	32	-	32	-	
	Presentaseperangkat daerah yang menerapkan unsur SPIP	Persentase	NA	60	100	70	-	80	-	
	Persentase perangkat daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)	Persentase	NA	10	100	15	-	20	-	

Indikator tersebut berdampak pada tujuan SDG's:

1. Indikator efektivitas pengendalian korupsi akan berdampak pada indikator "Secara substantial mengurangi persepsi pencegahan korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya"
2. Indikator nilai maturitas SPIP, persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standard, persentase perangkat daerah yang menerapkan unsur SPIP, dan persentase perangkat daerah yang melakukan

FCP (Fraud Control Planning), akan berdampak pada indikator "Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat"

Dari indikator tersebut telah tercapai target yang telah ditetapkan yang juga dapat menunjang indikator dari SDG's.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD telah sesuai dengan Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, termasuk Program, Kegiatan, Sasaran, Target dan Anggaran. Matrik Usulan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.7.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**89**	**13.435.500**	**Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota**		**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**83,05**	**21.177.603,413,56**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun**	**14 dokumen**	**62.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab. Nganjuk**	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan**	**11 dokumen**	**45.067**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	12.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	23.386	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi	1 dokumen	5.058	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD					penyusunan dokumen RKA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.058	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 dokumen	6.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen	1 dokumen	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			perubahan DPA-SKPD					perubahan DPA-SKPD			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	11.565	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	6.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**7 dokumen**	**12.500**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat**	**18 laporan**	**23.100**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
								daerah yang disusun			
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	2.500	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	5.556	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	2.500	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	2.500	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	-	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik	2 laporan	2.500	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik	16 laporan	17.544	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			Daerah pada SKPD					Daerah pada SKPD			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	2.500	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**63 dokumen**	**9.648.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**1 laporan**	**8.727.154**	
								Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	**49 orang**		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	55 orang/bln	9.500.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang/bln	8.606.194.000	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ve	52 dokumen	110.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ver	84 dokumen	112.680	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			rifikasi keuangan SKPD					ifikasi keuangan SKPD			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	6.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	20.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	8.280	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	6 laporan	12.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan	6 laporan	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			bulanan/triwulan/semesteran SKPD					bulanan/triwulan/semesteran SKPD			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**55 dokumen**	**914.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49 dokumen**	**7.998.894**	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	30.000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	-	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	110 paket	47.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	49 paket	42.434	
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	7.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah pegawai berdasarkan	45 orang	500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Inspektorat Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan	45 orang	7.830.960	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi		tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab.Nganjuk	tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	80.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	55 orang	250.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 orang	125.500	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**51 dokumen**	**1.075.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang disediakan**	**20 paket**	**1.381.543.029**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
								Jumlah laporan penatausahaan perkantoran yang disusun	**51 laporan**		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	30.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	32.751,885	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	9 paket	30.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	15.813	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5 paket	25.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	15.512,500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6 paket	200.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	246.112,144	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	5 paket	40.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	36.234,500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	18.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	35.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	42.890,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	447.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	609.691	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip	1 dokumen	50.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen penatausahaan arsip	1 dokumen	184.537,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			dinamis pada SKPD					dinamis pada SKPD			
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	200.000	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	186.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**90 unit**	**685.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**27 unit**	**1.555.339,543,56**	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	50 unit	135.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah paket mebel yang disediakan	12 unit	149.406	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	40 unit	550.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	1.405.933,543,56	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Laporan Penyediaan**	**12 laporan**	**414.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Inspektorat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan**	**12 laporan**	**480.550**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**Pemerintahan Daerah**	**Kab.Nganjuk**	**Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	12.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	11.750	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	250.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	186.600	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	150.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	282.200	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**109 unit**	**625.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**99 unit**	**965.955,841**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	19 unit	250.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	189.443,341	
	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	35.000	Pemeliharaan Mebel	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	20.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	90.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	92.662,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan	5 unit	250.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah gedung kantor dan bangunan	2 unit	663.850	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			Bangunan Lainnya		lainnya yang dipelihara/direhabilitasi			
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan unsur SPIP**	**80%**	**1.415.000**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**		**Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT**	**100%**	**905.343,200**	
								Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	**95,38%**		
								Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasa APIP > 80%	**76%**		
								Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	**100%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah PD yang menerapkan Manajemen Risiko**	**35 OPD**	**1.045.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Cakupan laporan kegiatan pengawasan dan konsultasi**	**295 laporan**	**700.897,200**	
			Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah (mandatory) yang direviu	**100%**				**Persentase PD yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK**	**100%**		
			Persentase jumlah rekomendasi BPK yang selesai ditindaklanjuti	**90%**				**Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP**	**100%**		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	8 laporan	250.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	2 laporan	152.252	
	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	2 laporan	40.000	Reviu Laporan Kinerja	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	67 laporan	48.992	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	119 laporan	80.000	Reviu Laporan Keuangan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	205 laporan	45.256	
	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	100 laporan	140.000	Pengawasan Desa	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	20 laporan	60.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	85.000	Kerjasama Pengawasan Internal	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	35.601,700	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	450.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	358.795,500	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah laporan pengawasan dengan tujuan tertentu**	**8 laporan**	**370.000**	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Persentase laporan pengaduan yang tertangani**	**100%**	**204.446**	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			yang dilakukan					**yang dilakukan**			
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	4 laporan	100.000	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	51.090	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	4 laporan	270.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1 laporan	153.356	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)**	**20%**	**1.130.000**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**		**Jumlah dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai standart**	**1 dokumen**	**1.320.098,394**	
								Persentase PD yang melaksanakan Manajemen Risiko sesuai standart	**62%**		
								Persentase PD yang layak diusulkan	**8%**		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
								mendapat predikat WBK/WBBM			
								Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK	**95,24**		
								Persentase PD yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standart	**54%**		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah kegiatan pengawasan yang memiliki standar operasional**	**2 kegiatan**	**230.000**	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko**	**1 dokumen**	**128.584**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	90.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	**128.584**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah rekomendasi kebijakan	1 rekomendasi	140.000	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang	Inspektorat Daerah	Jumlah rekomendasi kebijakan	-	-	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	**Program/ Kegiatan**	**Lokasi**	**Indikator Kinerja**	**Target capaian**	**Pagu indikatif (Rp.000)**	
			teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun			Fasilitasi Pengawasan	Kab.Nganjuk	teknis di bidang fasilitasi pengawasan yang disusun			
	Pendampingan dan Asistensi	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan pendampingan**	**52 OPD**	**900.000**	**Pendampingan dan Asistensi**	**Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk**	**Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan register risiko sesuai standart**	**31 Perangkat Daerah**	**1.191.514.394**	
								Persentase PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas	**90%**		
								Jumlah PD patuh melaksanakan Pedoman MCP KPK	**14 Perangkat Daerah**		
								Jumlah PD yang menyusun Register Risiko Fraud tepat waktu	**30 Perangkat Daerah**		
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan	52 OPD	400.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan	Inspektorat Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan	52 OPD	547.185,910	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah			Pemerintahan Daerah	Kab.Nganjuk	pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah			
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	100.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	55.140	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	300.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi	3 kegiatan	549.948,484	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampinga	52 OPD	100.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Inspektorat Daerah Kab.Nganjuk	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampinga	52 OPD	39.240	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	
			n, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas					n, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas			
TOTAL					15.980.500	TOTAL				23.403.045,007,56	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.8.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan

Kabupaten Nganjuk Tahun 2026

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yaitu **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"** dengan prioritas Pembangunan Nasional tahun 2026 sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan HAM;
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru;
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi;
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas;
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Ekonomi;
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan;
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur;

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2026 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional. Prioritas Kabupaten Nganjuk yang didukung oleh Inspektorat adalah "Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik serta pengembangan digitalisasi pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan"

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah sesuai dengan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah "Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi", adapun sasaran yang akan dicapai yaitu:

1. Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk
2. Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah
3. Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)
4. Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Baik melalui Kualitas Sistem Pengendalian Internal Terintegrasi	Nilai Maturitas SPIP	3,210

Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2026
Meningkatnya penguatan Aparat Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk	Nilai Kapabilitas APIP	3,020
Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,210
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	91
	2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	94,95
Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,24

Sumber: Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2026 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi dan misi Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, yaitu **"Peningkatan Daya Saing Daerah dan Transformasi Pelayanan Publik"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Peningkatan kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya serta ketahanan daerah;
2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui investasi, pengembangan produk unggulan lokal, swasembada pangan dan air, serta perluasan lapangan pekerjaan;
3. Peningkatan infrastruktur konektivitas antar wilayah dan infrastruktur layanan dasar;
4. Peningkatan kualitas pembangunan manusia yang unggul, sehat, cerdas dan berdaya saing, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan sosial masyarakat;
5. Mendorong daya saing daerah dan produktivitas sektor potensial berbasis ekonomi digital;
6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan serta kemandirian desa;
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik serta pengembangan digitalisasi pelayanan publik dan administrasi pemerintahan;
8. Pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Sebagai operasionalisasi strategi dan arah kebijakan pembangunan dirumuskan program Perangkat Daerah yang didalamnya mencakup program pembangunan daerah sebagai representasi 15 (lima belas) program unggulan Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk masa bhakti 2025-2029, yang meliputi:

1. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan saluran;
2. Peningkatan profesionalisme dan birokrasi inovatif, bersih tanpa korupsi;
3. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran;
4. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
5. Penguatan pendidikan diniyah dan pesantren;
6. Peningkatan layanan kesehatan masyarakat dan pengadaan mobil siaga kelurahan;
7. Menjadikan nganjuk sebagai destinasi wisata;
8. Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional;
9. Menjadikan Kabupaten Nganjuk sebagai agropolitan;
10. Mewujudkan Kabupaten Nganjuk layak anak dan responsif gender;
11. Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal serta lingkungan hidup;
12. Revitalisasi bidang peternakan dan pertanian serta subsisidi pupuk;
13. Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif UMKM;
14. Pengembangan jejaring antar daerah kabupaten, kota, provinsi dan pusat serta warga nganjuk di perantauan;
15. Peningkatan ADD dan kesejahteraan kelembagaan desa atau kelurahan (RT, RW, BPD/LPM dan kader).

3.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal, Pemerintah

Daerah diwajibkan untuk memberikan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal, dengan target 100% (seratus persen) untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Pendidikan anak usia dini	100%
2.	Pendidikan dasar	100%
3.	Pendidikan kesetaraan	100%
4.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100%
5.	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100%
6.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%
7.	Pelayanan kesehatan balita	100%
8.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
9.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
10.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%
11.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%
12.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%
13.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%
14.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100%
15.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus)	100%
16.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
17.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100%
18.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%
19.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	100%
20.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%
21.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%
22.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%
23.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%
24.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
25.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%
26.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
27.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%
28.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%
29.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%

Sumber: Permendagri Nomor 100 Tahun 2018

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
INSPEKTORAT KAB. NGANJUK
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		INSPEKTORAT						**23.403.045.007,56**							**18.199.000.000,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**23.403.045.007,56**							**18.199.000.000,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**23.403.045.007,56**							**18.199.000.000,00**	
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Inspektorat Daerah***	**-**			**83,05 Nilai**	**21.177.603.413,56**						**-**	**15.774.000.000,00**	
		[meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah]	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83.25**	**82.95**	**83**	**83.05**	**21.177.603.413,56**	-	-	-	-	-	-	**15.774.000.000,00**	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja, dan Data Kinerja Perangkat Daerah yang Ditetapkan*	-			11 dokumen	45.067.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	51.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	23.386.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		15.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.058.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	5.058.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		8.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	11.565.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		20.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN* *Jumlah Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang Disusun*	-			49 orang 1 laporan	8.727.154.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	10.130.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				49 Orang/bulan	8.606.194.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		10.000.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				84 Dokumen	112.680.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		110.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.280.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		20.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang Disusun*	-			18 laporan	23.100.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	12.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				2 Dokumen	5.556.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		5.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				16 Laporan	17.544.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		7.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah*	-			49 dokumen	7.998.894.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	1.900.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				49 Paket	42.434.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		50.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				45 Orang	7.830.960.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		1.500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				49 Orang	125.500.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Pelayanan Perkantoran yang Disediakan* *Jumlah Laporan Penatausahaan Perkantoran yang Disusun*	-			20 Paket 51 Laporan	1.381.543.029,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	1.340.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	32.751.885,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		32.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	15.813.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		30.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	15.512.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		28.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	246.112.144,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Paket	36.234.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		18.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	42.890.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				36 Laporan	609.691.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		500.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	184.537.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		200.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Dokumen	186.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		200.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah yang disediakan*	-			27 Unit	1.555.339.543,56			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	750.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				12 Unit	149.406.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	1.405.933.543,56	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		600.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran yang Disusun*	-			12 Laporan	480.550.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	616.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	11.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		16.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	186.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	282.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam Kondisi Baik*	-			99 unit	965.955.841,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	975.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	189.443.341,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		300.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				35 Unit	20.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		35.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1*** ***Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasa APIP > 80%*** ***Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT***	-			**95,38 %** **76 %** **100 %**	**905.343.200,00**						-	**1.405.000.000,00**	
		-	-	-	-	-	-	**905.343.200,00**	-	-	-	-	-	-	**1.405.000.000,00**	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Cakupan laporan kegiatan pengawasan dan konsultasi* *Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP* *Persentase PD yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK*	-			295 laporan 100 % 100 %	700.897.200,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	1.035.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Laporan	152.252.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		250.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				67 Laporan	48.992.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		45.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				205 Laporan	45.256.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		80.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	60.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				1 Kesepakatan	35.601.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		90.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				6 Dokumen	358.795.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		470.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Persentase laporan pengaduan yang tertangani*	-			100 %	204.446.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	370.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				1 Laporan	51.090.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		100.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				1 Laporan	153.356.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		270.000.000,00	INSPEKTORAT
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Persentase PD yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM*** ***Jumlah dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai standart*** ***Persentase Perangkat Daerah yang melakukan FCP (Fraud Control Planning)*** ***Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK*** ***Persentase PD yang melaksanakan Manajemen Risiko sesuai standart***	-			**8 %** **1 dokumen** **54 %** **95,24 %** **62 %**	**1.320.098.394,00**						-	**1.020.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Jumlah dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko*	-			1 dokumen	128.584.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	150.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomendasi	128.584.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		150.000.000,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah PD patuh melaksanakan Pedoman MCP KPK* *Jumlah PD yang melaksanakan Register risiko sesuai standart* *Jumlah PD yang menyusun Register Risiko Fraud tepat waktu* *Persentase PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas*	-			14 Perangkat Daerah 31 perangkat daerah 30 perangkat daerah 90 %	1.191.514.394,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk	-	870.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				52 perangkat daerah	547.185.910,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		420.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				22 perangkat daerah	55.140.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		60.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3 Kegiatan	549.948.484,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		350.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				52 perangkat daerah	39.240.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	JATIM BERKAH-AMANAH Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif PD 7 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik, serta Pengembangan Digitalisasi Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	Kab. Nganjuk		40.000.000,00	INSPEKTORAT
	JUMLAH							**23.403.045.007,56**							**18.199.000.000,00**	

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2026. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pengawasan.

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2026)
1.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang baik serta pengembangan digitalisasi pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan	23.403.045,007,56

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2026)	Alokasi (2026)
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel	Persentase perangkat daerah yang menerapkan SPIP sesuai standart	32%	23.403.045,007,56
	Meningkatnya penguatan Aparat	Nilai Kapabilitas APIP	3,020	

	Pengawas Internal (APIP) Kabupaten Nganjuk			
	Meningkatnya kualitas pengendalian risiko Pemerintah Daerah	Indeks Manajemen Risiko	3,210	
	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal (APIP) dan eksternal (BPK-RI)	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal	91	
		2. Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal	94,95	
	Meningkatnya kualitas pencegahan korupsi oleh APIP	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah	95,24	

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2026

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Program Penunjang Urusan Pemerintshan Daerah Kabupaten/ Kota	**Nilai SAKIP Inspektorat Daerah**	**83,05**	**21.177.603,41 3,56**
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang ditetapkan**	**11 dokumen**	**45.067**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 dokumen	23.386
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	5.058
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	5.058
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7 laporan	11.565
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	1 laporan	-

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun**	**18 laporan**	**23.100**
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 dokumen	5.556
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokumen	-
	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian Barang Milik Daerah dan hasil koordinasi penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 laporan	-
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	16 laporan	17.544
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun**	**1 laporan**	**8.727.154**
		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	**49 orang**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 orang/bln	8.606.194.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	84 dokumen	112.680
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	4 dokumen	-
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	8.280

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	6 laporan	-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**49 dokumen**	**7.998.894**
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	4 unit	-
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	49 paket	42.434
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai	55 dokumen	-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dn fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	45 orang	7.830.960
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	55 orang	-
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	49 orang	125.500
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah peralatan dan perlengkapan pelayanan perkantoran yang disediakan**	**20 paket**	**1.381.543.029**
		Jumlah laporan penatausahaan perkantoran yang disusun	**51 laporan**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	4 paket	32.751,885

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	4 paket	15.813
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4 paket	15.512,500
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	246.112,144
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4 paket	36.234,500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dokumen	12.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 laporan	42.890,500
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	36 laporan	609.691
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	184.537,500
	Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1 dokumen	186.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	**27 unit**	**1.555.339,543 ,56**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	12 unit	149.406
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	15 unit	1.405.933,543, 56
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**12 laporan**	**480.550**

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4 laporan	11.750
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	4 laporan	186.600
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4 laporan	282.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dalam kondisi baik**	**99 unit**	**965.955,841**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 unit	189.443,341
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	20.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 unit	92.662,500
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	663.850
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	**Persentase Penyelenggaraan Assurance dan Consulting sesuai dengan PKPT**	**100%**	**905.343,200**
		Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun N-1	**95,38%**	
		Persentase PD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil Pengawasa APIP > 80%	**76%**	
		Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan	**100%**	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	**Cakupan laporan kegiatan pengawasan dan konsultasi**	**295 laporan**	**700.897,200**
		Persentase PD yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK	**100%**	
		Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil pengawasan APIP	**100%**	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan hasil pengawasan kinerja pemerintah daerah	2 laporan	152.252
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan hasil reviu laporan kinerja	67 laporan	48.992
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu laporan keuangan	205 laporan	45.256
	Pengawasan Desa	Jumlah laporan hasil pengawasan desa	20 laporan	60.000
	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah kesepakatan pengawasan internal yang terbentuk	1 kesepakatan	35.601,700
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP	6 dokumen	358.795,500
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	**Persentase laporan pengaduan yang tertangani yang dilakukan**	**100%**	**204.446**
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah laporan penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditangani	1 laporan	51.090
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan hasil pengawasan dengan tujuan tertentu	1 laporan	153.356
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIKAJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	**Jumlah dokumen Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko sesuai standart**	**1 dokumen**	**1.320.098,394**
		Persentase PD yang melaksanakan	**62%**	

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
		Manajemen Risiko sesuai standart		
		Persentase PD yang layak diusulkan mendapat predikat WBK/WBBM	**8%**	
		Nilai masing-masing area intervensi MCP KPK	**95,24**	
		Persentase PD yang melaksanakan Fraud Control Planning (FCP) sesuai standart	**54%**	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	**Jumlah dokumen Perencanaan Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko**	**1 dokumen**	**128.584**
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah rekomendasi kebijakan teknis di bidang pengawasan yang disusun	1 rekomendasi	**128.584**
	Pendampingan dan Asistensi	**Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan register risiko sesuai standart**	**31 Perangkat Daerah**	**1.191.514.394**
		Persentase PD yang menindaklanjuti hasil evaluasi zona integritas	**90%**	
		Jumlah PD patuh melaksanakan Pedoman MCP KPK	**14 Perangkat Daerah**	
		Jumlah PD yang menyusun Register Risiko Fraud tepat waktu	**30 Perangkat Daerah**	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan dan asistensi urusan pemerintahan daerah	52 OPD	547.185,910
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian reformasi birokrasi	52 OPD	55.140
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi	Jumlah kegiatan koordinasi,	3 kegiatan	549.948,484

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp. 000)
		Uraian (Output)	Target	
	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	monitoring, dan evaluasi serta verifikasi pencegahan dan pemberantasan korupsi		
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah perangkat daerah yang dilakukan pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas	52 OPD	39.240

4.2. Proyek Strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah

1. Penguatan Pengendalian Internal Pemerintah daerah melalui SPIP dan Manajemen Risiko
2. Peningkatan Kapabilitas APIP
3. Pendampingan Pembangunan Zona Integritas
4. Pengawasan Proyek Strategis Pemerintah Daerah

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Inspektorat Daerah dengan rencana pembangunan tahunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rancangan Renstra Inspektorat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk, menetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. melaksanakan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Tahun 2026 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   b. melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah, untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Inspektorat Daerah; dan

c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Inspektorat Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026; dan
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2026, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Inspektorat Daerah dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001